

IMPLEMENTASI E - GOVERNMENT DI DINAS KOMINFOSSTATIK KABUPATEN BEKASI

Ryan Ahmad Firmansyah, Herbasuki Nurcahyanto, Aufarul Marom

Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi mendorong adopsi teknologi dalam segala aspek, tak terkecuali sektor pemerintahan, sejak 2003 *e – government* telah diterapkan guna peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Lokus dalam penelitian ini berada di Dinas Kominfoantik Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *e – Government* di Diskominfoantik Kabupaten Bekasi serta faktor pendukung dan penghambat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara sebagai instrumen. Responden merupakan pegawai yang bekerja di kantor Dinas Kominfoantik Kabupaten Bekasi. sebanyak 3 orang khususnya yang terkait dengan implementasi sistem *e – Government*. Hasil penelitian menunjukkan implementasi *e - government* telah berjalan dengan baik ditandai dengan adanya kerangka jangka panjang, kesiapan infrastruktur, serta manfaat secara internal dan eksternal namun masih terhambat dengan struktur birokrasi yang kurang spesifik serta SDM yang masih kurang. Peneliti memberi rekomendasi untuk Dinas Kominfoantik untuk mengalokasikan modalnya untuk mengembangkan SDM untuk mendukung implementasi *e – government*.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, *e – Government*

Abstract

Technological developments encourage technology adoption in all aspects, including the government sector, since 2003 e-government has been implemented to improve the quality of governance from the central level to the regions. The locus in this study was at the Office of Kominfoantik Bekasi Regency. This study aims to analyze the implementation of e-Government in Diskominfoantik Bekasi Regency as well as the supporting and inhibiting factors. The method used in this study is qualitative with interviews as instruments. Respondents are employees who work at the Office of Kominfoantik Bekasi Regency. as many as 3 people especially those related to the implementation of the e-Government system. The results of the study show that the implementation of e-government has been going well, marked by the existence of a long-term framework, infrastructure readiness, as well as internal and external benefits, but it is still hampered by a less specific bureaucratic structure and a lack of human resources. The researcher provides recommendations for the Kominfoantik Service to allocate capital to develop human resources to support the implementation of e-government.

Keyword: policy, implementation, e - government

PENDAHULUAN

Birokrasi dalam melakukan perannya diarahkan untuk menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Maka untuk mendukung hal itu penting untuk melakukan reformasi birokrasi sebagai upaya transformasi dalam birokrasi agar lebih efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut dengan mengadopsi teknologi. Teknologi sebagai hasil cipta manusia yang diarahkan untuk memudahkan pekerjaan manusia karena itu teknologi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Jika berbicara teknologi hari ini maka teknologi yang dikenal oleh masyarakat umum sebagai digital/ dunia maya. Di dalam praktek birokrasi digitalisasi ini termanifestasi dalam *e – government* atau *digital government* dimana birokrasi mengadopsi teknologi untuk meningkatkan program dan pelayanan publik. Dalam lingkungan ekonomi digital global saat ini, pentingnya *e – government* adalah pertumbuhan. Tujuan penting dari *e – government* adalah untuk memastikan interaksi digital antara pemerintah dan warganya serta secara simultan antara pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di negara tersebut. Untuk alasan ini, *e – government* yang dikembangkan sepenuhnya dapat memastikan bahwa

administrasi publik lebih efisien, lebih cepat, dan lebih murah sekaligus menjadi lebih mudah digunakan, terutama jika layanan dapat diakses selama 24 jam dalam 7 hari (Josef Horák, 2021)

Tabel 1.1

Perbandingan indeks *e – government* di ASEAN

<i>Country</i>	OSI	HCI	TII	EDGI
Singapore	0,964	0,890	0,889	0,915
Malaysia	0,852	0,751	0,763	0,789
Thailand	0,794	0,775	0,700	0,756
Brunei Darussalam	0,635	0,820	0,760	0,738
Filipina	0,729	0,583	0,754	0,689
Vietnam	0,652	0,669	0,677	0,666
Indonesia	0,661	0,682	0,566	0,6612
Cambodia	0,452	0,546	0,534	0,511
Myanmar	0,258	0,523	0,512	0,738
Laos	0,194	0,283	0,553	0,328

Sumber : UN Government Index 2020

Dari survei tersebut akan dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu *low EGDI*, *Middle EGDI*, *High EGDI*, dan *Very High EGDI*. Dilansir dari laporan tahunan UN *e – Government Index Development* Di tahun 2020 Indonesia sendiri berada di posisi ke – 88 dengan nilai indeks 0,6612 yang masuk ke dalam kelompok *high EGDI* dengan nilai

Online Service Index (OSI) 0,824 dengan kategori *high OSI*. Posisi Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara tetangga di region Asia Tenggara, seperti Singapura yang menempati posisi ke – 11 *EDGI rank* dengan dengan nilai 0,9150, kemudian Malaysia di posisi – 47 dengan nilai 0,7892, dan Thailand yang berada di posisi ke – 57 dengan nilai 0,7565. Dari hasil survei tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia agar bisa meningkatkan kualitas dari *e – Government* guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan. **(Department of Economic and Social Affairs, 2020)**

Hasil evaluasi Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 menunjukkan indeks sebesar 1,60 dengan predikat kurang. Hasil menunjukkan kurangnya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengembangkan *Digital Government*.

Tabel 1.2

**Hasil Evaluasi SPBE 2021 Kabupaten/
Kota di Jawa Barat**

Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
Pemerintah Kabupaten Sumedang	3,52	Sangat Baik
Pemerintah Kabupaten Karawang	3,39	Baik
Pemerintah Kabupaten Ciamis	3,32	Baik
Pemerintah Kabupaten Garut	3,25	Baik
Pemerintah Kota Bandung	3,19	Baik
Pemerintah Kota Bogor	3,11	Baik
Pemerintah Kota Depok	2,99	Baik
Pemerintah Kota Sukabumi	2,98	Baik
Pemerintah Kota Bekasi	2,94	Baik
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	2,85	Baik
Pemerintah Kabupaten Majalengka	2,82	Baik
Pemerintah Kota Cimahi	2,75	Baik
Pemerintah Kota Banjar	2,72	Baik
Pemerintah Kabupaten Bogor	2,72	Baik
Pemerintah Kota Tasikmalaya	2,68	Baik
Pemerintah Kabupaten Indramayu	2,57	Cukup
Pemerintah Kabupaten Cianjur	2,46	Cukup
Pemerintah Kabupaten Subang	2,44	Cukup
Pemerintah Kabupaten Purwakarta	2,37	Cukup

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	2,05	Cukup
Pemerintah Kabupaten Cirebon	1,91	Cukup
Pemerintah Kabupaten Bekasi	1,60	Kurang
Pemerintah Kabupaten Sukabumi	1,56	Kurang

(Evaluasi SPBE 2021)

Dengan Fasilitas dan Infrastruktur yang memadai karena dekat dengan Ibu Kota DKI Jakarta dan berada di urutan 3 wilayah dengan skala ekonomi terbesar di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2018) dengan nominal PDRB mencapai Rp305.343 miliar (Good news from Indonesia. 2020). Seharusnya Kabupaten Bekasi dapat mengimplementasikan *e – government* dengan lebih baik. Kabupaten Bekasi dinilai mampu memperoleh alat dan teknologi, serta mempunyai sumber daya manusia yang menyanggupi terhadap pengimplementasian *e – government* ini. Salah satu hambatan dalam implementasi *e – government* di Kabupaten Bekasi adalah kurangnya infrastruktur. Kemudian dari *political will* yang masih belum maksimal dalam memperbaiki *e – government* (Bilal Sukarno, 2021). Faktor yang menjadi pendorong dan penghambat penerapan *e – government* di Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dapat dilihat melalui elemen sukses pengembangan *e –*

government, dimana untuk menerapkan konsep digitalisasi pada sektor pemerintahan harus memperhatikan elemen sukses tersebut karena dapat mendorong keberhasilan *e – government*, tetapi juga dapat menjadi faktor penghambat penerapan *e – government*. Adapun elemen-elemen sukses pengembangan *e – government* tersebut meliputi *support*, *capacity*, dan *value* (Agung R Pamungkas, 2020)

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dasar dari penelitian yang dijelaskan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menganalisis implementasi *e - government* di Dinas Kominfostatik Kabupaten Bekasi dan mengetahui faktor yang menghambat implementasi *e – government* di Dinas Kominfostatik Kabupaten Bekasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengambilan data melalui wawancara, mendalam. Tempat yang dipilih sebagai lokasi pada penelitian adalah Dinas Diskominfostatik Kabupaten Bekasi. Peneliti menggunakan informan penelitian sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan dalam

penelitian ini, yaitu pegawai Dinas Diskominfoantik Kabupaten Bekasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Implementasi *E – Government* Dinas Diskominfoantik Kabupaten Bekasi

1. Kebijakan

Kebijakan dapat dimaknai sebagai indikator bagaimana suatu kebijakan tersebut diukur apakah benar sebenarnya dibutuhkan untuk publik (masyarakat) atau tidak. Tolak ukur pertama dalam menilai ketercapaian kebijakan adalah melihat apakah kebijakan tersebut tepat atau tidak. Sama halnya kebijakan implementasi *e – government* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Kerangka Arsitektur SPBE

Diskominfoantik kabupaten bekasi menyusun perencanaan dengan dasar – dasar hukum seperti yang diutarakan oleh salah satu narasumber

Perencanaan tersebut menjadi acuan dalam implementasi *e – government* di Kabupaten Bekasi dalam kurun jangka menengah sesuai dengan instruksi pemerintah pusat mengenai penerapan SPBE

Dengan mengacu terhadap kebijakan yang telah ditentukan selanjutnya melakukan pengaturan rencana (*planning*). rencana yang diformulasikan ini adalah hasil tentang analisis strategi serta macam – macam ketetapan yang telah diputuskan. Penetapan tujuan, sasaran, serta pencatatan rencana tersebut sepadan dengan beban yang menjadi komitmen setiap komponen kerja.

2. Program

Selanjutnya, perencanaan yang telah dibentuk diuraikan lagi ke dalam program – program operasional. Pembentukan program ini harus bersifat menyederhanakan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan – kegiatan operasional. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus jelas dalam pembentukan program adalah deskripsi mengenai corak aktivitas yang harus dilaksanakan dalam bentuk paparan aktivitas yang terang, baik paparan aktivitas bagi setiap satuan tugas maupun paparan aktivitas dari masing – masing individu yang berpartisipasi di dalamnya. Program merupakan turunan dari kebijakan, yang kemudian dijalankan sebagai strategi – strategi yang wujudnya adalah aktivitas – aktivitas, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Program,

strategi, dan aktivitas merupakan bagian dari implementasi kebijakan, hasilnya berupa “ciptaan” yang merupakan luaran dan hasil dari suatu kebijakan (Sutmasa, 2021)

Selanjutnya dalam tahap kedua yang harus dilaksanakan oleh pelaksana dari elemen manajerial adalah pengorganisasian. Dengan melewati aksi ini akan membangun suatu organisasi (bisa dalam bentuk tim) yang sanggup untuk menjalankan program – program yang telah ditentukan. Maka dari itu dengan melewati pengaturan, sumber daya manusia, sarana, tugas, wewenang, tanggung jawab dan aturan bekerja diatur sedemikian rupa sehingga dapat digerakan untuk melaksanakan kegiatan. Dan sejalan dengan tindakan ini, orang – orang tersebut perlu didorong agar mereka mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program. Sebagai phase terakhir yang harus dilakukan oleh penyelenggara dari komponen manajerial adalah membangun teknik – teknik dan aturan - aturan yang diperlukan, termasuk upaya untuk persisten memantau hasil-hasil selama program itu dalam proses pelaksanaan. Jadi, sambil berjalannya kegiatan operasional, pengawasan dijalankan.

Dinas Kominfostantik Kabupaten Bekasi dalam ini ada beberapa program yang

dijalankan yang pertama pembentukan sistem informasi arsitektur. Pembentukan kerangka arsitektur didasari pada UU No 43 Tahun 2020 tentang kerangka arsitektur. Selain kerangka arsitektur pembentukan tim koordinas di setiap instansi guna membantu pengembangan SPBE di masing – masing dinas karena dalam *e – government* atau SPBE diantaranya yaitu Diskominfoantik sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengembangan *e – government*, dan . Para pelaksana kebijakan *e – government* dibagi atas tugas pokok dan fungsi masing – masing. Dalam melaksanakan suatu kebijakan tentunya diperlukan komunikasi yang baik antar instansi yang terkait. Apabila hubungan yang terjalin tidak baik maka pelaksanaan kebijakan tidak bisa berhasil. Dalam pelaksanaan *e – government* Dinas Kominfostantik Kabupaten Bekasi, komunikasi antar pelaksana kebijakan terkait dinilai telah berjalan dengan baik dengan adanya tim koordinasi *e – government* di setiap bidang – bidang internal dan dinas – dinas di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Kemudian ada pembangunan infrastruktur berupa jaringan *fiber optic* guna memperluas jaringan internet di seluruuh daerah. Dinas Diskominfoantik Kabupaten Bekasi dalam

hal ini telah membuat beberapa aplikasi pendukung pelayanan secara elektronik, seperti *bebunge* dalam hal ini Dinas Kominfoantik berperan sebagai fasilitator baik penyediaan infrastruktur jaringan hingga pembuatan aplikasi bagi dinas – dinas yang akan membuat sebuah platform pelayanan daring.

3. Pemanfaatan

Kebijakan implementasi *e – government* sangat diperlukan oleh masyarakat karena seperti yang sudah kita pahami pelayanan publik dituntut untuk lebih efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tata kelola birokrasi dalam melayani publik harus mengadopsi perkembangan tersebut, Tentunya *e - government* ini berlaku untuk seluruh dinas baik yang dinas diskominfoantik maupun dinas yang ada di setiap dinas yang ada di daerah khususnya Kabupaten Bekasi.

Untuk *output* sendiri berupa *Wifi Public* yang tersebar di beberapa titik yang ada di kabupaten bekasi untuk membantu proses implementasi SPBE. Kemudian beberapa aplikasi juga dibuat untuk membantu administrasi pemerintah dan layanan publik seperti *bebunge* dan *open data center*.

Secara internal permasalahan muncul saat salah satu user dari dinas lain meminta request tidak memiliki spesifik guna pembuatan aplikasi sehingga membingungkan dinas diskominfoantik, seperti yang diutarakan oleh salah satu narasumber

Untuk *outcome* dari implementasi yang dirasakan oleh dari 2 sisi, dari sisi taraf kepercayaan masyarakat semakin tinggi karena memang masyarakat bisa mengukur dan menilai sendiri pelayanan yang diberikan pemerintah daerah seterusnya terkait dengan yang secara ekonomi dari tata kelola yang akuntabel dan transparan akan berimplikasi pada pendapatan daerah, perencanaan dan pembelanjaan yang transparan dan terbuka maka pembangunan ekonomi di daerah akan lebih terasa oleh masyarakat seperti yang diutarakan oleh salah satu narasumber

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi *e – Government* Dinas Diskominfoantik Kabupaten Bekasi

1. Komunikasi (*Communication*)

Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, alokasi sumber daya, dan program yang akan dicapai telah siap (Akib, IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, 2010). Sebagai proses kebijakan publik (*public policy process*) memiliki posisi yang penting karena meskipun kebijakan tersebut baik, jika tidak diatur dengan baik maka tujuan kebijakan tidak akan bisa dicapai. Sejumlah kasus dari program kebijakan diperlukan koneksi yang baik antar lembaga yang terkait melalui proses komunikasi dan koordinasi. Dengan demikian, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang sinergis antar lembaga guna ketercapaian pelaksanaan suatu program. Komunikasi terkait dengan bagaimana kebijakan disalurkan pada organisasi atau publik, kesiapan sumber daya guna melaksanakan kebijakan, tingkah laku serta respon para aktor yg berpartisipasi, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Pada implementasi *e – government*, pola komunikasi terkait dengan persiapan implemetansi *e – government* kurang baik. Dalam komunikasi, ada tiga tolak ukur yang digunakan dalam menilai efektivitasnya yaitu : 1) Transmisi; wadah komunikasi yang baik akan dapat melahirkan suatu implementasi yang baik pula. Banyak ditemukan penyaluran komunikasi adalah adanya gagal paham (*mis-understanding*). 2) Kejelasan; komunikasi yang ditangkap oleh para

eksekutor kebijakan di lapangan haruslah jelas dan tidak *miss perseption* (tidak ambigu). Pada fase tertentu para pelaksana dibutuhkan keluwesan dalam menjalankan kebijakan, tetapi pada keadaan lain keluwesan justru akan menimbulkan penyimpangan tujuan yang hendak dituju dari suatu kebijakan. c) Konsistensi, instruksi yang disampaikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan terang untuk dilaksanakan atau dijalankan. Karena jika instruksi yang disampaikan selalu berubah-ubah, maka dapat memunculkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan (Bailah & Pasla, 2021)

Konsistensi peraturan *e – government* sangat baik dimana untuk implemetansi *e – government* mengacu pada Perpres 95 Tahun 2018 dan belum berubah hingga saat ini namun untuk peraturan kerangka aplikasi mengalami beberapa kali perubahan sehingga membingungkan pelaksana *e – government* itu sendiri dimana harus melakukan bimtek (bimbingan teknologi) ulang.

Untuk segi pemahaman pelaksana dikatakan sangat memahami yang ditandai dengan perencanaan yang mencapai target yang sudah direncanakan namun untuk beberapa

perubahan posisi memerlukan adaptasi terutama jika diisi oleh individu yang bukan keahliannya sehingga harus melaksanakan bimtek (bimbingan teknologi).

Untuk pengetahuan pelaksana cukup baik karena update dalam sosialisasi dan pelatihan setiap ada perubahan atau peraturan baru karena penerapan e – government ini sudah dilakukan sejak 2018 atau terbitnya perpres SPBE

2. Sumber Daya (*Resource*)

Sumberdaya merupakan faktor yang ikut berpengaruh implementasi. Sumber daya merupakan modal atau masukan yang dipakai agar program dapat berjalan dengan baik yaitu berupa sumberdaya manusia, atribut dan informasi pendukung, serta instrumen yang terdiri dari fasilitas dan finansial (Ariyani, Hakim, & Noor, 2014).

Untuk sumber daya manusia Dinas Diskominfoantik Kabupaten Bekasi secara kuantitas masih sangat kurang karena keterbatasan jumlah SDM yang tersedia, Dinas Diskominfoantik Kabupaten Bekasi hanya mampu merekrut tenaga honorer yang tentu *salary* yang didapatkan tidak akan sebesar di privat karena keterbatasan anggaran yang juga menyebabkan tidak bisa merekrut lebih banyak SDM.

Hal senada juga diucapkan oleh kepala seksi bidang TIK terkait kekurangan SDM dalam segi jumlah SDM yang kurang yang memaksa harus merekrut tenaga honorer yang tentu secara kualitas lebih rendah

Untuk sarana prasarana telah tersedia *wifi public* yang telah tersebar di banyak fasilitas publik di Kabupaten Bekasi yang bisa digunakan oleh masyarakat dan tersedia data center yang menghimpun data – data dan melindungi data publik yang dikelola oleh Bidang Persandian Dinas Diskominfoantik Kabupaten Bekasi Untuk sumber daya material kabupaten bekasi memiliki jaringan fiber optic yang terbentang dari ujung utara Kabupaten (Muara Gembong) hingga ujung selatan (Cibarusah) guna mendukung implementasi *e – government* dan sedang dilakukan uprading menuju jaringan 5G sementara untuk keuangan kabupaten bekasi didukung oleh APBD tahunan sebesar 6 Triliun sehingga sangat mendukung untuk percepatan implementasi *e – government*.

3 Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition or Attitudes*)

Disposisi berkaitan dengan sikap dari pelaksana yang memang harus beriringan dan dapat diterima dengan kebijakan publik itu sendiri. Disini, disposisi tidak hanya menangkap apa yang harus dilakukan

namun juga harus memiliki kapabilitas untuk mengimplementasikan. Faktor – faktor disposisi yaitu: 1) penunjukan birokrasi: penentuan dan pengangkatan individu pelaksana kebijakan harus berasal dari individu – individu yang mempunyai sumbangsih pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih distingtif lagi pada kebutuhan masyarakat; 2) insentif: menggunakan insentif untuk mempengaruhi tindakan para aktor kebijakan penting dilakukan, misalnya dengan cara meningkatkan profit, sehingga pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan dengan baik karena kepentingan pribadinya (*self interest*) terpenuhi (Sutmasa, 2021).

Dinas Diskominfoantik Kabupaten bekasi dalam pemilihan personel untuk jabatan didasarkan pada regulasi, terutama untuk ASN yang kinerjanya dinilai setiap tahunnya yang akan mempengaruhi jabatan dan remunerasinya. Dedikasi akan kebijakan juga ditunjukkan oleh atasan dalam hal ini kepala dinas yang melaksanakan program sesuai yang telah direncanakan di awal dan tetap dalam on the track serta tidak mudah puas dengan hasil yang dicapai.

Untuk insentif diberikan dalam bentuk tunjangan kinerja dengan catatan target yang

telah ditetapkan telah dicapai. Seperti yang diutarakan oleh salah satu narasumber

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Edward III dalam (Ariyani, Hakim, & Noor, 2014) menyatakan bahwa penyelenggara dapat terhalang oleh struktur organisasi di tempat pelaksana bertugas. Ada dua sifat yang mencolok dari struktur birokrasi, yaitu prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Keduanya dapat menghambat koordinasi yang dibutuhkan untuk memmanifestasikan suatu kebijakan yang membutuhkan kolaborasi dari banyak orang. SOP menjadi panduan bagi tiap – tiap pelaksana untuk bekerja agar dalam implementasi kebijakan tidak bergeser dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek struktur birokrasi yang terlampau gemuk dan terpecah akan condong kepada melonggarkan pengawasan, prosedur birokrasi yang sulit dan bertele - tele juga menyebabkan kegiatan organisasi menjadi tidak luwes sehingga implementasi tidak dapat dijalankan dengan baik.

Secara fragmentasi struktur *e – government* diemban oleh bidang teknologi dan informasi dimana terdapat sub koordinator kelompok jabatan fungsional *e – government* yang mengurus keperluan *e –*

government di Dinas Diskominfoantik Kabupaten Bekasi. Pemahaman struktur birokrasi atau organisasi dapat dipahami sebagai bentuk interaksi kekuasaan dan kerja sama di antara actor pelaksana (instansi) berkaitan dengan pelaksana kebijakan. Terkait dengan struktur organisasi dalam implementasi *e – government*, dapat disimpulkan sudah ada pengorganisasian dan kerja sama yang sinergis di tiap unsur, baik dari Pemerintah Kabupaten, hingga dinas – dinas di Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Untuk mendukung koordinasi dinas Diskominfoantik Kabupaten Bekasi membentuk tim koordinator SPBE di setiap dinas untuk menampung kebutuhan guna implementasi *e – government* Setiap dinas saling terhubung dan melaksanakan instruksi dan beban masing-masing dengan baik sehingga tidak ada hambatan yang mengganjal mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring evaluasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari tenaga ahli dinas diskominfoantik Kabupaten Bekasi

Untuk standar operasional saat ini Diskominfoantik Kabupaten Bekasi mempunyai regulasi kerangka arsitektur yang ada 4 lapis struktur yaitu akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media telekomunikasi lainnya. Namun

untuk struktur birokrasi kurang spesifik dimana urusan implementasi *e – government* dipegang oleh sub koordinator bidang *e – government* di bawah bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga sangat memberatkan karena ada 4 domain dengan 47 indikator yang harus dipenuhi dan juga harus berkoordinasi dengan tim koordinator SPBE di Kabupaten bekasi, diperlukan spesifikasi struktur dengan membuat *e – government* menjadi struktur tersendiri guna mengurus *e – government*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari tenaga ahli dinas diskominfoantik Kabupaten Bekasi

KESIMPULAN

Peneliti menarik kesimpulan dari hasil dan analisis penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kesimpulan yang bisa diambil oleh peneliti mengenai implementasi *e – government* Dinas Kominfoantik Kabupaten Bekasi. Dalam proses implementasi terdapat karakteristik yang sudah berjalan dengan optimal dan juga terdapat karakteristik yang belum atau tidak berjalan dengan optimal, selain itu juga terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat pada implementasi *e – government* Dinas Kominfoantik Kabupaten Bekasi. Dari segi kebijakan implementasi *e – government* Dinas Kominfoantik Kabupaten Bekasi hanya

mengacu pada Perpres 95 Tahun 2018 sedangkan untuk tataran regulasi di tingkat daerah belum dibuat. Program dijalankan ditujukan untuk membangun pengembangan *e – government*, selain ada program pembangunan infrastruktur jaringan dilakukan sebagai turunan dari kebijakan SPBE. *Output* dari implementasi *e – government* berupa *wifi public* dan portal pelayanan publik seperti *bebunge* dan open data center yang tersedia di *google playstore*. *Outcome* dari implementasi yang dirasakan oleh dari 2 sisi satu dari sisi taraf kepercayaan dan ekonomi.

Faktor Pendukung implementasi *e – government* didorong oleh tim koordinator yang membantu komunikasi antara dinas – dinas terkait kemudian dukungan sumber daya modal dan sarana prasarana.

Faktor penghambat implementasi *e – government* Dari perspektif kelengkapan struktur birokrasi kurang spesifik, kualitas dan kuantitas SDM masih kurang serta konsistensi SOP.

4.2. Saran

Menurut kesimpulan di atas yang telah dijabarkan maka masukan yang dibagikan agar implementasi *e – government* di Dinas Diskominfoantik Kabupaten Bekasi dapat menggapai hasil yang optimal sesuai dengan yang direncanakan yaitu: Mengalokasikan

sumber daya modal guna mengembangkan sumber daya manusia guna pengembangan *e – government*, membuat struktur khusus yang tersendiri bagi bidang yang mengurus *e – government*, melakukan evaluasi secara periodik pada implementasi *e – government* di Dinas Diskominfoantik Kabupaten Bekasi, guna melihat capaian pelaksanaan inovasi pelayanan, dan sosialisasi dilakukan secara terstruktur

DAFTAR PUSTAKA

- Agung R Pamungkas, L. E. (2020). EVALUASI FAKTOR KEGAGALAN SISTEM INFORMASI PADA KESIAPAN PENERAPAN E-GOVERNMENT: STUDI LITERATUR. *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)* , 143-152.
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-11.

- Ariyani, D., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Probolinggo. *JPAL*, 15-22.
- Bailah, & Pasla, B. N. (2021). Tantangan Kepala Sekolah Penggerak Dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Paradigma Baru. *Jurnal Prajaiswara*.
- Bilal Sukarno, N. F. (2021). Kegagalan Implementasi E-Government Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi di Era Pandemi. *Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung*, 1-13.
- Dody, S., & Srihardjono, N. B. (2016). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG DESA DENGAN MODEL EDWARD III DI DESA LANDUNGSARI KABUPATEN MALANG. *REFORMASI*, 125-134.
- Josef Horák, J. B. (2021). Implementation of eGovernment from the Perspective of Public Administration. *International Atlantic Economic Society*, 87–89.
- Sutmasa, Y. G. (2021). MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK. *JURNAL CAKRAWARTI*, 25-36.